Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 8, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

MENGGALI FAKTA PENDIDIKAN ORDE BARU DI MI KAYULEMAH SUMBERREJO: ANTARA REALITAS DAN REKONSTRUKSI SEJARAH

Dias Bagus Saputra, Sri Minarti
Pendidikan Agma Islam, Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro

e-mail : diasbagus0102@gmail.com, minarti@unugiri.ac.id

Abstrak

Pendidikan pada masa Orde Baru menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus memperkuat legitimasi kekuasaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas pendidikan pada era Orde Baru melalui pendekatan historis-kritis dengan menelaah hubungan antara kebijakan pendidikan, ideologi negara, dan rekonstruksi sejarah pasca reformasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi terhadap berbagai sumber sejarah, dokumen pendidikan, jurnal ilmiah, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sistem pendidikan Orde Baru. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui interpretasi historis dan pengkajian berbagai sumber yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Orde Baru mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama dalam pemerataan pendidikan dasar melalui pembangunan Sekolah Dasar Inpres, program wajib belajar, dan peningkatan angka melek huruf masyarakat. Akan tetapi, pendidikan juga dijadikan alat ideologisasi negara melalui penyeragaman kurikulum, penanaman ideologi Pancasila, serta pembatasan ruang berpikir kritis peserta didik. Rekonstruksi sejarah setelah reformasi memperlihatkan adanya peninjauan kembali terhadap narasi keberhasilan pendidikan Orde Baru yang sebelumnya dianggap dominan. Dengan demikian, pendidikan pada masa Orde Baru memiliki dua dimensi yang saling bertolak belakang, yaitu keberhasilan pembangunan pendidikan dan praktik hegemoni politik negara.

Kata kunci: pendidikan Orde Baru, sejarah pendidikan, kebijakan pendidikan, rekonstruksi sejarah, hegemoni politik

Abstrack

Education during the New Order era became one of the primary instruments in supporting national development as well as strengthening the legitimacy of the government. This study aims to examine the reality of education during the New Order period through a historical-critical approach by analyzing the relationship between educational policies, state ideology, and historical reconstruction after the Reform era. This research employed a qualitative method using observation techniques toward historical sources, educational documents, scientific journals, and government policies related to the New Order educational system. Data analysis was conducted descriptively through historical interpretation and review of relevant sources.

The findings reveal that education during the New Order experienced significant progress, particularly in the equalization of basic education through the construction of Presidential Instruction Elementary Schools (SD Inpres), compulsory education programs, and increased literacy rates. However, education was also utilized as a tool of state ideological indoctrination through curriculum standardization, inculcation of Pancasila

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism Checker No 2635

Copyright : Author
Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ideology, and restrictions on students' critical thinking. Historical reconstruction after the Reform era demonstrates attempts to reassess the dominant narrative regarding the success of New Order education. Therefore, education during the New Order had two contradictory dimensions: educational development achievements and practices of political hegemony.

Keywords: New Order education, educational policy, historical reconstruction, political hegemony, history of education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu bangsa karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Dalam sejarah Indonesia, kebijakan pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi politik dan arah pemerintahan yang sedang berlangsung. Salah satu periode yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan nasional adalah masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.Masa Orde Baru berlangsung sejak tahun 19 66 hingga 1998 dengan fokus utama pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah menjadikan pendidikan sebagai sarana strategis untuk membentuk masyarakat yang mendukung program pembangunan negara.

Berbagai kebijakan pendidikan diterapkan pemerintah guna memperluas akses pendidikan masyarakat. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah pembangunan Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres) sejak tahun 1973. Program tersebut berhasil memperluas jangkauan pendidikan hingga daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program wajib belajar serta meningkatkan jumlah tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional.Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap meningkatnya angka partisipasi sekolah dan kemampuan baca tulis masyarakat Indonesia. Pendidikan pada masa Orde Baru sering dipandang sebagai salah satu keberhasilan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun demikian, pendidikan pada masa Orde Baru tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga menjadi alat penanaman ideologi negara. Pemerintah menerapkan sistem pendidikan yang bersifat sentralistik dengan pengawasan ketat terhadap kurikulum, buku pelajaran, serta materi sejarah nasional. Mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) diwajibkan sebagai bagian dari pembentukan loyalitas masyarakat terhadap negara.Kondisi tersebut menyebabkan ruang berpikir kritis dalam dunia pendidikan menjadi terbatas. Peserta didik lebih diarahkan untuk mematuhi kebijakan negara dibandingkan mengembangkan budaya dialog dan kebebasan akademik. Oleh karena itu, pendidikan pada masa Orde Baru sering dipandang memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu keberhasilan dalam pemerataan pendidikan dan praktik kontrol politik melalui sistem pendidikan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan Orde Baru memberikan dampak besar terhadap perkembangan pendidikan nasional, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan kepentingan politik pemerintah. Tilaar menjelaskan bahwa pendidikan pada masa tersebut lebih diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dibandingkan pengembangan kebebasan akademik. Sementara itu, Sirozi menilai bahwa kebijakan pendidikan Orde Baru

digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat kekuasaan negara.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena berusaha mengkaji pendidikan Orde Baru secara lebih seimbang melalui perspektif historis dan rekonstruksi sejarah. Penelitian tidak hanya menyoroti keberhasilan pembangunan pendidikan, tetapi juga membahas praktik ideologisasi dan hegemoni politik yang terjadi dalam sistem pendidikan pada masa tersebut.Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan realitas pendidikan pada masa Orde Baru; (2) menganalisis pendidikan sebagai alat ideologi dan kekuasaan; serta (3) mengkaji rekonstruksi sejarah pendidikan Orde Baru dalam perspektif pasca reformasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi. Observasi dilakukan di MI Kayulemah Sumberrejo sebagai lokasi penelitian untuk melihat bagaimana pandangan guru dan lingkungan se kolah terhadap pendidikan pada masa Orde Baru serta pengaruhnya terhadap sistem pendidikan saat ini. Pengamatan dilakukan terhadap budaya disiplin sekolah, sistem pembelajaran, administrasi pendidikan, dan pemahaman guru mengenai kebijakan pendidikan era Orde Baru.

Data penelitian diperoleh melalui hasil observasi di lingkungan madrasah, pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, serta kajian berbagai sumber tertulis seperti buku sejarah pendidikan, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan hasil observasi dan menghubungkannya dengan teori serta fakta sejarah pendidikan Indonesia.

Data penelitian diperoleh melalui observasi berbagai sumber tertulis seperti buku sejarah pendidikan, jurnal ilmiah, arsip kebijakan pemerintah, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan cara menafsirkan fakta-fakta sejarah pendidikan secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk memahami realitas pendidikan Orde Baru dan rekonstruksi sejarah yang berkembang setelah reformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan sebagai Instrumen Pembangunan Nasional di MI Kayulemah Sumberrejo

Berdasarkan hasil observasi di MI Kayulemah Sumberrejo, pendidikan pada masa Orde Baru dipandang sebagai periode yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan dasar di Indonesia. Guru dan tenaga pendidik menilai bahwa kebijakan pemerintah pada masa tersebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan formal bagi kehidupan sosial masyarakat.Program pemerataan pendidikan melalui pembangunan Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres) dianggap mampu memperluas akses pendidikan hingga wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya angka partisipasi sekolah dan kemampuan baca tulis masyarakat Indonesia.Pemerintah menjalankan program Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres) sejak tahun 1973 untuk memperluas akses pendidikan hingga wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Program tersebut menjadi salah satu kebijakan pendidikan terbesar pada masa Orde Baru karena mampu meningkatkan jumlah sekolah dan angka partisipasi pendidikan dasar masyarakat Indonesia.[1]

[1] Khaeruddin, "Pendidikan Era Orde Baru; Implementasi dan Realitas Pelaksanaan (1967–1990)," *Keraton: Journal of History Education and Culture*, Vol. 6, No. 2, 2024.

Selain pembangunan sekolah dasar, pemerintah juga melaksanakan program wajib belajar enam tahun sebagai upaya memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan formal. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya angka melek huruf dan pemerataan pendidikan nasional.[2] Tilaar menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi negara.[3] Pandangan serupa juga dijelaskan oleh Hasbullah yang menyatakan bahwa pendidikan pada masa tersebut ditempatkan sebagai sarana pembentukan sumber daya manusia yang mendukung program pembangunan pemerintah.[4] Pemerintah juga melakukan perekrutan tenaga pendidik dalam jumlah besar serta memperluas lembaga pendidikan guru guna memenuhi kebutuhan pendidikan nasional.

Walaupun pembangunan pendidikan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, kualitas pembelajaran belum sepenuhnya mengalami peningkatan. Sistem pendidikan pada masa itu masih menekankan budaya hafalan, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap otoritas. Kurikulum yang bersifat sentralistik menyebabkan sekolah dan guru memiliki ruang terbatas untuk mengembangkan inovasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik.

B. Pendidikan sebagai Alat Ideologisasi Negara dalam Perspektif Pendidikan di MI Kayulemah Sumberrejo

Hasil observasi di MI Kayulemah Sumberrejo menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Orde Baru tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pendidikan, tetapi juga dengan penanaman ideologi negara. Sistem pendidikan pada masa tersebut berada di bawah pengawasan pemerintah yang cukup ketat, terutama dalam penggunaan kurikulum, materi pembelajaran, dan penyampaian sejarah nasional di sekolah. Pendidikan pada masa Orde Baru dipahami sebagai sarana untuk membentuk loyalitas masyarakat terhadap pemerintah melalui sistem pendidikan yang terpusat. Pemerintah mewajibkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan penataran P4 sebagai bagian dari upaya membentuk loyalitas masyarakat terhadap negara.

Buku pelajaran sejarah disusun secara terpusat sehingga menghadirkan narasi sejarah tunggal yang mendukung legitimasi kekuasaan pemerintah. Peristiwa sejarah tertentu disampaikan secara sepihak untuk memperkuat citra pemerintah Orde Baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak sepenuhnya bersifat netral karena dipengaruhi kepentingan politik negara.Sudrajat menjelaskan bahwa pendidikan sejarah pada masa Orde Baru digunakan untuk membangun hegemoni negara melalui pembentukan narasi sejarah nasional yang seragam.[5] Sekolah dijadikan ruang untuk membentuk kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah sehingga budaya demokratis dan kebebasan berpikir kritis kurang berkembang.

Dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, pendidikan pada masa Orde Baru dapat dipahami sebagai sarana dominasi negara untuk mempertahankan kekuasaan melalui pembentukan pola pikir masyarakat. Negara tidak hanya menggunakan pendekatan politik dan kekuasaan, tetapi juga membangun legitimasi melalui pendidikan, budaya, dan narasi sejarah yang dikendalikan pemerintah. Ricklefs menjelaskan bahwa pemerintah Orde Baru berupaya menjaga stabilitas nasional dengan membentuk keseragaman pandangan masyarakat melalui berbagai kebijakan negara, termasuk sektor pendidikan.

---

[2] Safei dan Hudaidah, "Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968–1998)," *Jurnal Humanitas*, Vol. 7, No. 1, 2021.
[3] H. A. R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
[4] Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
[5] M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2008).

C. Kurikulum dan Penyeragaman Sistem Pendidikan di MI Kayulemah Sumberrejo

Berdasarkan pengamatan Saya di MI Kayulemah Sumberrejo, sistem pendidikan saat ini masih menunjukkan beberapa pengaruh dari kebijakan pendidikan Orde Baru, terutama dalam penerapan kedisiplinan, administrasi pendidikan, dan penggunaan kurikulum nasional secara terpusat. Budaya disiplin dalam kegiatan pembelajaran, seperti ketepatan waktu, penggunaan seragam, dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, masih menjadi bagian dari praktik pendidikan yang diterapkan di lingkungan madrasah. Pemerintah mengontrol kurikulum, materi pembelajaran, hingga sistem evaluasi pendidikan secara ketat. Kurikulum nasional diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal masyarakat.Pada masa Orde Baru terdapat beberapa perubahan kurikulum, yaitu Kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994. Kurikulum 1968 menekankan pembentukan jiwa Pancasila dan semangat pembangunan nasional. Kurikulum 1975 lebih menekankan efisiensi pembelajaran melalui tujuan instruksional khusus. Sementara itu, Kurikulum 1984 memperkenalkan konsep Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), dan Kurikulum 1994 mengintegrasikan muatan nasional serta lokal dalam pembelajaran.[6]

Meskipun penyeragaman kurikulum memberikan standar pendidikan nasional yang relatif sama di berbagai daerah, kebijakan tersebut juga menyebabkan keterbatasan inovasi pembelajaran. Irawan menjelaskan bahwa sentralisasi kurikulum membuat sekolah dan guru kurang leluasa mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan masyarakat lokal.[7] Selain itu, sistem pendidikan Orde Baru lebih menekankan pembentukan warga negara yang patuh dibandingkan pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pendidikan diarahkan untuk menjaga stabilitas negara dan memperkuat loyalitas masyarakat terhadap pemerintah.[8]

D. Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Orde Baru di MI Kayulemah Sumberrejo

Berdasarkan hasil observasi di MI Kayulemah Sumberrejo, pemahaman mengenai pendidikan Orde Baru mengalami perubahan setelah era reformasi. Pendidikan pada masa tersebut mulai dipandang secara lebih kritis dengan melihat sisi positif dan negatif dari kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah terhadap masyarakat dan dunia pendidikan. Jika sebelumnya pendidikan Orde Baru sering dianggap sebagai keberhasilan pembangunan nasional, maka setelah reformasi banyak akademisi mulai menyoroti sisi hegemonik dan represif dari sistem pendidikan tersebut.Rekonstruksi sejarah dilakukan melalui peninjauan ulang terhadap dokumen, kebijakan pendidikan, dan pengalaman masyarakat pada masa Orde Baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari praktik kontrol politik negara.[9]

Namun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh kebijakan pendidikan Orde Baru bersifat negatif. Yunus menjelaskan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan pada masa Orde Baru memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan angka melek huruf dan perkembangan pendidikan dasar nasional. Oleh karena itu, penilaian terhadap pendidikan Orde Baru perlu dilakukan secara objektif dan proporsional.Dalam konteks historiografi, rekonstruksi sejarah pendidikan penting dilakukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih objektif mengenai masa

[6] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).
[7] Samsuri, "Civic Virtues dalam Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan di Indonesia Era Orde Baru," *Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 2, 2004.
[8] Tati, "Kurikulum Pendidikan di SD dan SMA pada Masa Orde Baru," *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 4, No. 2, 2017.
[9] Irawan, "Kurikulum Pendidikan Nasional pada Masa Orde Baru," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2020.

lalu.[10] Pendidikan Orde Baru tidak hanya dipahami sebagai keberhasilan pembangunan nasional, tetapi juga sebagai bagian dari praktik kekuasaan negara dalam mempertahankan stabilitas politik. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa penulisan sejarah harus dilakukan secara kritis agar mampu melihat fakta sejarah secara lebih proporsional dan tidak hanya berdasarkan narasi penguasa.[11]

E. Implikasi Pendidikan Orde Baru terhadap Pendidikan di MI Kayulemah Sumberrejo Saat Ini

Hasil observasi di MI Kayulemah Sumberrejo menunjukkan bahwa beberapa warisan pendidikan Orde Baru masih dapat ditemukan dalam praktik pendidikan saat ini, seperti budaya disiplin, orientasi administratif, dan penekanan terhadap pencapaian akademik peserta didik. Selain itu, pola pembelajaran yang menekankan keteraturan dan kepatuhan terhadap aturan sekolah juga masih terlihat dalam kegiatan pendidikan di madrasah. Pola pendidikan yang bersifat sentralistik, budaya ujian, dan orientasi administratif masih terlihat di berbagai lembaga pendidikan.Di sisi lain, keberhasilan pembangunan infrastruktur pendidikan pada masa Orde Baru menjadi fondasi penting bagi perkembangan pendidikan nasional. Program pemerataan pendidikan memberikan pelajaran penting bagi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan masyarakat.

Pendidikan masa kini perlu mengambil nilai positif dari pemerataan pendidikan yang dilakukan pada masa Orde Baru, sekaligus menghindari praktik hegemoni politik dalam sistem pendidikan. Pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, demokratis, dan menghargai keberagaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pendidikan pada masa Orde Baru menunjukkan dua realitas yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah berhasil memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah, program wajib belajar, serta peningkatan angka melek huruf masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan nasional dan pemerataan pendidikan dasar di Indonesia.Namun di sisi lain, pendidikan juga dimanfaatkan sebagai sarana legitimasi kekuasaan negara. Sistem pendidikan yang sentralistik, penyeragaman kurikulum, serta penanaman ideologi negara menyebabkan kebebasan berpikir kritis peserta didik menjadi terbatas. Pendidikan lebih diarahkan untuk membentuk kepatuhan terhadap pemerintah dibandingkan mengembangkan budaya demokratis dan kebebasan akademik.

Rekonstruksi sejarah pendidikan Orde Baru menunjukkan bahwa pendidikan pada masa tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai keberhasilan pembangunan nasional ataupun semata-mata alat represi politik. Pendidikan Orde Baru merupakan kombinasi antara keberhasilan pemerataan pendidikan dan praktik hegemoni politik negara.Oleh karena itu, pendidikan masa kini perlu mengambil nilai positif dari keberhasilan pemerataan pendidikan pada masa Orde Baru, sekaligus menghindari praktik kontrol politik dalam sistem pendidikan. Pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, demokratis, dan menghargai keberagaman.

[10] Yunus, "Kebijakan Pendidikan Indonesia pada Era Orde Baru," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 23, No. 4, 2018.
[11] Sudrajat, "Pendidikan Sejarah dan Hegemoni Negara pada Masa Orde Baru," *Jurnal Historika*, Vol. 1, No. 2, 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, A. R., Satria, A., & Ulaya, L. (2024). *Analisis kritis kurikulum pendidikan di Indonesia masa Orde Baru*. QAZI: Journal of Islamic Studies, 1(1).

Cahyani, R. (2024). *PSPB: Kurikulum sejarah 1984 dan pengaruh terhadap pemikiran generasi muda Indonesia*. ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah, 20(1).

Hidayat, P. (2015). *Perkembangan SD Inpres pada masa Orde Baru tahun 1973–1983*. Risalah: Jurnal Pendidikan Sejarah.

Irawan, D. (2020). *Kurikulum pendidikan nasional pada masa Orde Baru*. Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(1), 88–101.

Khaeruddin. (2024). *Pendidikan Era Orde Baru; Implementasi dan Realitas Pelaksanaan (1967–1990)*. Keraton: Journal of History Education and Culture, 6(2).

Nababan, C. S., Delvi, L., & Pratiwi, Y. N. (2024). *Kilas balik kebijakan wajib belajar dan Inpres pada masa Orde Baru*. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah, 8(1).

Nasution, S. (2012). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi.

Safei, S., & Hudaidah, H. (2021). *Sistem pendidikan umum pada masa Orde Baru (1968–1998)*. Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan

Samsuri. (2004). *Civic virtues dalam pendidikan moral dan kewarganegaraan di Indonesia era Orde Baru*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 1(2).

Sirozi, M. (2010). *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudrajat, A. (2017). *Pendidikan sejarah dan hegemoni negara pada masa Orde Baru*. Jurnal Historika, 1(2), 65–79.

Tati, A. (2017). *Kurikulum pendidikan di SD dan SMA pada masa Orde Baru*. Jurnal Pendidikan Sejarah, 4(2), 89–102.

Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yunus, H. (2018). *Kebijakan pendidikan Indonesia pada era Orde Baru*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 23(4), 355–370.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.